

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim merupakan isu global yang semakin mendesak dan berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan, termasuk lingkungan, perekonomian, dan kesehatan masyarakat. Sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, serta kenaikan permukaan laut dapat menimbulkan berbagai risiko negatif bagi ekosistem, sektor pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dari segi ekologi (Cooke et al., 2021), perubahan iklim dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dengan memengaruhi persebaran spesies flora dan fauna, meningkatkan intensitas bencana alam seperti banjir dan kekeringan, serta mempercepat degradasi lingkungan. Dalam sektor pertanian, ketidakpastian pola curah hujan dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas tanaman pangan, meningkatkan kemungkinan gagal panen, dan mengancam ketahanan pangan nasional. Selain itu, kenaikan permukaan laut dapat mengakibatkan abrasi pantai, intrusi air laut, serta berkurangnya lahan pemukiman dan pertanian di daerah pesisir.

Dampak perubahan iklim juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Peningkatan suhu global dapat mempercepat penyebaran penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah, sementara bencana alam yang lebih sering terjadi dapat memperburuk kondisi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat (N. Young et al., 2016). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang komprehensif untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Upaya tersebut mencakup pengembangan kebijakan berkelanjutan, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan (Greenpeace Indonesia, 2020).

Sebagai salah satu organisasi lingkungan berskala global, Greenpeace memiliki peran yang krusial dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Fenomena perubahan iklim, yang ditandai dengan meningkatnya suhu global, kejadian cuaca ekstrem, serta kenaikan permukaan air laut, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Greenpeace mengimplementasikan pendekatan yang menyeluruh dengan mengintegrasikan advokasi kebijakan, aksi langsung, peningkatan kesadaran publik, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan solusi yang berkelanjutan (Greenpeace Indonesia, 2020).

Salah satu program guna menciptakan yang berkaitan adalah upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan oleh Greenpeace. Adaptasi terhadap perubahan iklim merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kerentanan terhadap dampak yang telah terjadi atau yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks ini, Greenpeace menekankan urgensi perlindungan serta pemulihan ekosistem alami sebagai bagian dari strategi adaptasi (Greenpeace International, 2023).

Upaya tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap pelestarian hutan, mangrove, dan terumbu karang, yang berperan sebagai benteng alami dalam menghadapi bencana seperti banjir, erosi pantai, dan badai. Selain memberikan perlindungan fisik, ekosistem ini juga memiliki fungsi ekologis yang penting, yakni sebagai penyerap karbon yang berkontribusi dalam menurunkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer (Forsyth, 2017).

Greenpeace juga berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat lokal agar dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim. Melalui berbagai program edukasi dan pelatihan, organisasi ini mendorong penerapan praktik pertanian berkelanjutan yang lebih tangguh terhadap kondisi cuaca ekstrem serta mengadvokasi pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Di wilayah pesisir, Greenpeace turut berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur yang berorientasi pada keberlanjutan, seperti sistem drainase yang lebih efisien serta desain bangunan yang disesuaikan untuk menghadapi risiko kenaikan permukaan laut (Putra, 2024).

Mitigasi perubahan iklim bertujuan untuk menekan emisi gas rumah kaca guna mencegah dampak lingkungan yang lebih serius di masa mendatang. Dalam

upaya ini, Greenpeace berperan sebagai pelopor dalam kampanye global yang mendorong peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan. Organisasi ini secara aktif mendesak pemerintah serta sektor industri untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi berbasis batu bara, minyak, dan gas, serta mengadopsi energi bersih seperti tenaga surya, angin, dan hidro (Syifa & Suwatno, 2022).

Selain itu, Greenpeace juga mengkritisi praktik penambangan yang berdampak negatif terhadap lingkungan sekaligus mendorong peningkatan investasi dalam teknologi energi terbarukan yang berkelanjutan (Greenpeace International, 2023).

Greenpeace memiliki peran strategis dalam upaya mengatasi deforestasi, yang merupakan salah satu kontributor utama terhadap emisi karbon global. Melalui berbagai kampanye, seperti *Save the Amazon* dan *Protect the Forests*, organisasi ini berupaya menghentikan praktik penebangan liar serta ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berdampak negatif terhadap keberlanjutan hutan hujan tropis. Hutan-hutan tersebut tidak hanya berperan sebagai penyerap karbon alami yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga sebagai ekosistem penting yang menopang keanekaragaman hayati (Greenpeace Brazil, 2022).

Greenpeace berperan aktif dalam mendorong penerapan kebijakan iklim yang progresif baik di tingkat nasional maupun internasional. Organisasi ini menekan pemerintah agar menetapkan target emisi nol bersih (net-zero emission), mengurangi subsidi bagi industri berbasis bahan bakar fosil, serta memperkuat regulasi terkait emisi karbon. Sebagai bagian dari upaya ini, Greenpeace turut berkontribusi dalam kampanye yang mendukung implementasi Perjanjian Paris 2015, yang bertujuan membatasi peningkatan suhu global di bawah 2°C guna mengurangi risiko perubahan iklim yang lebih ekstrem (Greenpeace International, 2023).

Greenpeace berperan aktif dalam mendukung implementasi Perjanjian Paris 2015, sebuah kesepakatan global yang bertujuan menangani perubahan iklim dengan membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C serta berupaya menekan peningkatan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri. Perjanjian ini disepakati

oleh 196 negara dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP21) di Paris (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2016). Dalam prosesnya, Greenpeace terlibat dalam berbagai kampanye yang bertujuan memastikan bahwa kesepakatan tersebut memiliki ambisi yang tinggi, bersifat adil, serta mengikat secara hukum guna mempercepat aksi nyata dalam mengatasi krisis iklim (Greenpeace International, 2025).

Greenpeace mengadvokasi agar Perjanjian Paris mencantumkan komitmen yang tegas dari setiap negara dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca, memperluas pemanfaatan energi terbarukan, serta mengalihkan investasi dari sektor industri berbasis bahan bakar fosil menuju solusi yang lebih berkelanjutan (Greenpeace International, 2025).

Menurut (Greenpeace International, 2025), Perjanjian Paris merupakan pencapaian penting dalam upaya global mengatasi perubahan iklim. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi kebijakan yang konkret, termasuk penghapusan subsidi bagi bahan bakar fosil serta peningkatan investasi dalam energi terbarukan.

Selain itu, Greenpeace menekankan urgensi keadilan iklim, dengan mendorong negara-negara maju yang memiliki tanggung jawab historis lebih besar atas emisi karbon untuk memberikan dukungan finansial dan transfer teknologi kepada negara-negara berkembang dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Putra, 2024).

Greenpeace memanfaatkan jangkauan globalnya untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai urgensi implementasi Perjanjian Paris. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk aksi langsung, lobi politik, serta kampanye media yang bertujuan menekan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar memenuhi komitmen iklim mereka. Selain itu, Greenpeace secara aktif memantau pelaksanaan Perjanjian Paris dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan emisi serta pencapaian target iklim. Sebagaimana dinyatakan oleh (Greenpeace European Unit, 2020), tanpa mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang jelas, komitmen iklim berisiko menjadi sekadar janji tanpa realisasi.

Dukungan Greenpeace terhadap Perjanjian Paris didasarkan pada keyakinan bahwa kerja sama internasional merupakan elemen krusial dalam mengatasi krisis iklim. Dengan menetapkan batasan terhadap peningkatan suhu global, perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi risiko dampak paling ekstrem dari perubahan iklim, termasuk cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, serta penurunan keanekaragaman hayati. Greenpeace terus berperan aktif dalam mendorong implementasi komitmen tersebut melalui kebijakan yang progresif dan tindakan nyata guna memastikan tercapainya tujuan mitigasi iklim secara efektif (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2016).

Greenpeace dikenal dengan pendekatan aksi langsung yang inovatif dan berdampak besar dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai urgensi perubahan iklim. Aksi-aksi ini kerap dilakukan di lokasi-lokasi strategis, seperti kantor perusahaan atau area proyek yang berpotensi merusak lingkungan. Sebagai contoh, Greenpeace pernah menggelar protes di anjungan minyak lepas pantai serta pembangkit listrik berbahan bakar batu bara guna menyoroti dampak negatif dari industri bahan bakar fosil terhadap lingkungan dan iklim global (Greenpeace UK, 2020).

Greenpeace dikenal dengan strategi aksi langsung yang inovatif dan berdampak besar dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap urgensi perubahan iklim. Aksi-aksi ini sering kali dilakukan di lokasi yang memiliki signifikansi strategis, seperti kantor perusahaan atau area proyek yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan. Sebagai ilustrasi, Greenpeace pernah menggelar protes di anjungan minyak serta pembangkit listrik berbahan bakar batu bara untuk menyoroti dampak negatif industri bahan bakar fosil terhadap lingkungan dan iklim global (Greenpeace UK, 2020).

Selain melakukan aksi langsung, Greenpeace juga memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana penyebaran informasi mengenai dampak perubahan iklim serta berbagai solusi yang dapat diterapkan. Melalui kampanye digital, organisasi ini berupaya membangun kesadaran serta mendorong partisipasi aktif individu dan komunitas dalam mengurangi jejak karbon serta mendukung kebijakan lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan (Greenpeace International, 2023).

Greenpeace memahami bahwa keberhasilan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bergantung pada kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Dalam menjalankan misinya, Greenpeace bermitra dengan komunitas lokal untuk merancang solusi berbasis masyarakat yang selaras dengan kondisi dan kebutuhan setempat (Greenpeace International, 2023).

Selain itu, organisasi ini turut berperan dalam berbagai forum internasional, seperti Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP), guna memastikan bahwa aspirasi serta kepentingan masyarakat yang terdampak dapat diperhitungkan dalam perumusan kebijakan iklim global (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2016).

Greenpeace secara konsisten menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui berbagai strategi, seperti perlindungan ekosistem, transisi menuju energi terbarukan, advokasi kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat. Meskipun tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim semakin kompleks, langkah-langkah yang diambil oleh Greenpeace memberikan optimisme bahwa aksi kolektif dan berkelanjutan dapat berkontribusi pada perubahan positif bagi kelestarian planet ini.

Menghadapi tantangan perubahan iklim yang kompleks, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ditunjang oleh kebijakan yang efektif, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim serta memastikan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Organisasi non-pemerintah memiliki peranan penting dalam strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Greenpeace, sebagai salah satu organisasi lingkungan yang berpengaruh secara global, secara aktif mengampanyekan serta mengadvokasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong langkah konkret dalam menangani isu lingkungan, termasuk perubahan iklim (Greenpeace Indonesia, 2020).

Di Indonesia, Greenpeace telah mengimplementasikan berbagai program dan inisiatif yang difokuskan pada pengurangan emisi gas rumah kaca, perlindungan

hutan, serta promosi energi terbarukan. Berbagai langkah tersebut dilakukan melalui penelitian, kampanye publik, serta kerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta guna menciptakan kebijakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, Greenpeace juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak perubahan iklim serta urgensi tindakan kolektif dalam menjaga lingkungan. Melalui strategi advokasi dan aksi nyata, organisasi ini turut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan lingkungan serta mendorong transisi menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Greenpeace, menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim secara efektif.

Walaupun Greenpeace dan organisasi lingkungan lainnya telah berkontribusi secara signifikan dalam menangani perubahan iklim, tantangan yang dihadapi di Indonesia tetap kompleks. Berbagai hambatan, seperti kurangnya dukungan kebijakan pemerintah, rendahnya kesadaran masyarakat, serta dampak industri yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, masih menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian keberlanjutan (Ji et al., 2021).

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mendesak dengan dampak luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia menghadapi kerentanan yang signifikan terhadap perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut, perubahan pola curah hujan, serta meningkatnya frekuensi bencana alam (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Meskipun berbagai inisiatif telah diupayakan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menanggulangi permasalahan ini, efektivitas program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim masih menjadi isu yang perlu dikaji lebih lanjut.

Sebagai salah satu organisasi lingkungan non-pemerintah (NGO) terkemuka di tingkat global, Greenpeace berperan aktif dalam mengadvokasi serta mengimplementasikan berbagai program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Inisiatif yang dijalankan mencakup upaya untuk mengurangi laju deforestasi, mendorong pemanfaatan energi terbarukan, serta meningkatkan

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lingkungan (Greenpeace Indonesia, 2020).

Meskipun Greenpeace telah berhasil membangun dukungan publik dan berkontribusi dalam memengaruhi kebijakan lingkungan, terdapat sejumlah tantangan yang masih menghambat efektivitas program-program yang dijalankan. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan dukungan kebijakan dari pemerintah, resistensi dari sektor industri, serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam inisiatif lingkungan (Ji et al., 2021).

Selain itu, dalam penelitian yang berjudul **Cultural dimensions of climate change impacts and adaptation. Nature Climate Change** karya Adger, W. N., Barnett, J., Brown, K., Marshall, N., & O'Brien, K. (2013), cenderung lebih berfokus pada dampak program Greenpeace dalam skala global atau nasional, sementara implementasi di tingkat lokal masih kurang mendapat perhatian. Padahal, efektivitas program adaptasi dan mitigasi sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan serta respons masyarakat setempat (Adger et al., 2013).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru mengenai efektivitas program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh Greenpeace di Indonesia (Greenpeace Indonesia, 2020). Dengan menitikberatkan pada implementasi di tingkat lokal, studi ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dalam literatur yang selama ini lebih banyak membahas dampak dalam skala global atau nasional.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sinergi yang lebih baik dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh Greenpeace di masa depan dan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Kontribusi Greenpeace Melalui Program Adaptasi dan Mitigasi dalam Menangani Deforestasi di Indonesia.**

Pertanyaan Penelitian

Dengan paparan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Greenpeace dalam mendukung program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia?

2. Bagaimana implementasi kebijakan perubahan iklim yang dilakukan pemerintah Indonesia?
3. Bagaimana kolaborasi antara Greenpeace dan pemerintah Indonesia dalam mendorong perubahan iklim melalui program adaptasi dan mitigasi?

Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis akan membatasi masalah dan memfokuskan masalah dengan mengacu kepada beberapa identifikasi yang telah dipaparkan agar lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam penelitian ini peneliti membatasinya dalam ruang lingkup penelitian pada **Program yang dilaksanakan oleh Greenpeace pada periode 2020–2024 berfokus pada upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak deforestasi serta perubahan iklim di Indonesia.**

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan upaya Greenpeace dalam mendorong program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
2. Untuk mengkaji implementasi kebijakan perubahan iklim di Indonesia.
3. Untuk menganalisis kolaborasi antara pemerintah dan lembaga non pemerintah khususnya Greenpeace dalam mencapai target perubahan iklim melalui adaptasi dan mitigasi.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

- 1.1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang dalam keilmuan disiplin Hubungan Internasional
- 1.2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai strategi dan efektivitas upaya Greenpeace dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia, serta menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan kolaborasi yang lebih efektif antara berbagai pemangku kepentingan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kerangka Teoritis – Konseptual

Teori Non-Governmental Organization (NGO)

Kerangka analitis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada Teori Organisasi Non-Pemerintah (NGO), yang memberikan pemahaman mendalam mengenai peran Greenpeace dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Teori ini menyoroti bahwa NGO, termasuk Greenpeace, berperan sebagai aktor non-negara yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan publik, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong aksi kolektif melalui berbagai bentuk advokasi, kampanye, dan program yang terstruktur. (Lewis, 2014).

Teori ini menjelaskan cara NGO beroperasi, membangun relasi dengan aktor-aktor dari sektor publik maupun swasta, serta bagaimana mereka dapat memengaruhi kebijakan dan praktik sosial yang ada. (Willetts Peter, 2010) mendefinisikan NGO sebagai suatu “asosiasi sukarela yang terdiri dari individu-individu yang bekerja sama secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama,” yang keberadaannya bersifat mandiri, terlepas dari campur tangan pemerintah maupun sektor bisnis. Definisi ini dikuatkan oleh (Baehr, 1999) yang menegaskan bahwa NGO umumnya bersifat misi-driven, fokus pada advokasi atau pelayanan, serta mencakup beragam ukuran dan bidang operasi di seluruh dunia.

Menurut Salamon dan Sokolowski, NGO yang merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai *third sector*—didefinisikan secara struktural-operasional berdasarkan empat kriteria utama. Pertama, NGO bersifat *privat*, artinya tidak berada di bawah kendali langsung pemerintah. Kedua, bersifat *non-profit distributing*, yakni keuntungan atau surplus yang diperoleh tidak dibagikan kepada anggota, melainkan dialokasikan kembali untuk mendukung tujuan organisasi. Ketiga, NGO memiliki sifat *self-governing*, yakni memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan. Terakhir, NGO bersifat *voluntary*, baik dari sisi keanggotaan maupun sumber pendanaan yang sering kali berasal dari kontribusi sukarela (Salamon & Sokolowski, 2016).

Definisi ini menekankan bahwa NGO beroperasi di luar struktur negara dan pasar, dengan tujuan publik yang jelas namun tetap menjaga independensinya secara kelembagaan. Posisi inilah yang memungkinkan NGO berperan sebagai

aktor penyeimbang sekaligus penggerak perubahan sosial dalam berbagai isu, termasuk lingkungan dan perubahan iklim.

(Najam, 2000) mengelompokkan peran NGO ke dalam empat kategori yang dikenal sebagai “empat C”: *Confrontation*, *Collaboration*, *Complementarity*, dan *Co-optation*. Melalui kerangka ini, NGO dipandang sebagai aktor yang fleksibel dalam menyesuaikan pendekatan strategisnya sesuai dengan konteks sosial dan politik yang dihadapi. Dalam peran sebagai *policy entrepreneur*, NGO dapat mengambil posisi konfrontatif (*confrontation*) dengan menantang kebijakan yang dianggap tidak berkelanjutan atau merugikan masyarakat. Di sisi lain, mereka juga dapat memilih untuk bekerja sama (*collaboration*) dengan pemerintah atau sektor swasta guna mengimplementasikan program secara lebih efektif.

Selain itu, NGO sering kali menjalankan peran pelengkap (*complementarity*) dengan mengisi kekosongan layanan publik, terutama di wilayah-wilayah yang kurang terjangkau oleh negara. Dalam konteks tertentu, NGO juga bisa menjadi bagian dari sistem kebijakan formal melalui proses *co-optation*, yaitu ketika mereka diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan resmi. Keempat peran ini menggambarkan bagaimana NGO memiliki kapasitas adaptif dalam menentukan taktik advokasi maupun operasional, tergantung pada tujuan, peluang, dan tantangan yang dihadapi di lapangan (Young, 2000).

(Edwards & Hulme, 1995) mengidentifikasi empat fungsi inti yang kerap dijalankan oleh NGO. Pertama adalah *service provision*, yakni pelaksanaan langsung program-program sosial maupun lingkungan, terutama di area yang kurang terjangkau oleh pemerintah. Kedua, fungsi *advocacy*, yang mencakup kegiatan kampanye kebijakan, lobi, serta pengarusutamaan isu-isu tertentu ke dalam agenda publik. Ketiga adalah *capacity building*, yaitu kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan komunitas agar mampu mandiri dan berdaya. Keempat, *monitoring and research*, yang diwujudkan melalui penerbitan laporan independen untuk menilai kinerja kebijakan publik dan mendorong akuntabilitas.

Keempat fungsi ini saling melengkapi dan menjadikan NGO sebagai aktor yang tidak hanya mengisi kekosongan peran negara, tetapi juga mampu mendorong

reformasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based*) dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Gretebeck, 2021).

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, NGO umumnya mengimplementasikan dua strategi utama yang saling melengkapi, yaitu adaptasi dan mitigasi. Strategi adaptasi difokuskan pada upaya untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap dampak iklim yang tidak dapat dihindari. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah *Ecosystem-based Adaptation* (EbA), yang menitikberatkan pada pengelolaan ekosistem sebagai bagian dari solusi (Nalau et al., 2018). Contohnya adalah restorasi hutan mangrove dan penguatan sistem peringatan dini terhadap cuaca ekstrem, yang terbukti efektif dalam melindungi komunitas pesisir dari risiko seperti kenaikan permukaan laut dan badai tropis.

Sementara itu, strategi mitigasi berfokus pada upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Dalam konteks ini, NGO berperan aktif melalui berbagai inisiatif, seperti kampanye transisi menuju energi bersih dan terbarukan, serta perlindungan hutan sebagai penyerap karbon alami (Rödder, 2020). Kedua pendekatan ini secara langsung bertujuan menekan laju kenaikan suhu global dan menjaga stabilitas iklim dalam jangka panjang.

Dalam konteks tata kelola lingkungan dan perubahan iklim, peran NGO sangat beragam dan strategis. Mereka kerap berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat sipil dengan para pembuat kebijakan, sekaligus menjadi fasilitator dalam dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, NGO juga berperan sebagai penggerak akuntabilitas publik dengan mendorong transparansi dan partisipasi dalam proses pengambilan Keputusan (Rödder, 2020).

Secara khusus, organisasi lingkungan atau *environmental NGOs* memiliki kontribusi penting dalam menyampaikan informasi sains iklim kepada publik. Melalui kegiatan penyuluhan, kampanye edukasi, dan advokasi berbasis data, mereka membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko perubahan iklim serta mendorong tindakan kolektif untuk mencari solusi yang berkelanjutan (Rödder, 2020).

Di tingkat global, NGO juga memainkan peran penting dalam mendukung berbagai program aksi iklim yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB). Keterlibatan mereka tidak hanya terbatas pada aspek teknis atau advokasi, tetapi juga mencakup upaya memadukan pemberdayaan sosial dengan keberlanjutan lingkungan (Giese, 2016). Pendekatan ini memungkinkan terciptanya strategi yang lebih holistik dalam merespons krisis iklim, karena mempertimbangkan dimensi ekologis sekaligus kebutuhan dan peran aktif masyarakat.

Secara umum, NGO memiliki sejumlah fungsi utama yang saling melengkapi, antara lain melakukan penelitian dan pemantauan, mendorong advokasi kebijakan, memberikan layanan langsung kepada masyarakat, serta memperkuat kapasitas komunitas lokal. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa peran NGO tidak semata-mata sebatas “mengisi kekosongan” dalam pelayanan publik yang tidak terpenuhi oleh negara, tetapi juga aktif dalam proses formulasi kebijakan. Selain itu, mereka turut meningkatkan kapasitas kelembagaan dan menjembatani hubungan antara masyarakat sipil dengan pemerintah (Youssef, 2021). Melalui peran-peran tersebut, NGO berkontribusi dalam mendorong adopsi gaya hidup berkelanjutan secara lebih luas dan terintegrasi di berbagai lapisan masyarakat.

Selain menjalankan fungsi-fungsi tersebut, NGO juga kerap menerbitkan laporan independen sebagai bagian dari mekanisme pemantauan kebijakan publik. Laporan-laporan ini berperan penting dalam menilai sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan di lapangan (Al-Barwani & Al-Alawi, 2022). Melalui temuan-temuan mereka, NGO dapat menyoroti berbagai pelanggaran, kekurangan, atau celah dalam implementasi kebijakan, sekaligus memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan ke depan.

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, NGO umumnya mengimplementasikan dua strategi utama yang saling melengkapi, yaitu adaptasi dan mitigasi. Strategi adaptasi difokuskan pada upaya untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap dampak iklim yang tidak dapat dihindari. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah *Ecosystem-based Adaptation* (EbA), yang menitikberatkan pada pengelolaan ekosistem sebagai bagian dari solusi (Nalau et al., 2018). Contohnya adalah restorasi hutan mangrove dan penguatan sistem

peringatan dini terhadap cuaca ekstrem, yang terbukti efektif dalam melindungi komunitas pesisir dari risiko seperti kenaikan permukaan laut dan badai tropis.

Sementara itu, strategi mitigasi berfokus pada upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Dalam konteks ini, NGO berperan aktif melalui berbagai inisiatif, seperti kampanye transisi menuju energi bersih dan terbarukan, serta perlindungan hutan sebagai penyerap karbon alami (Rödder, 2020). Kedua pendekatan ini secara langsung bertujuan menekan laju kenaikan suhu global dan menjaga stabilitas iklim dalam jangka panjang.

Dalam upaya menghadapi perubahan iklim, Greenpeace berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, dengan tujuan memastikan bahwa isu-isu lingkungan memperoleh perhatian yang memadai dalam agenda kebijakan baik di tingkat nasional maupun global (Betsill M Michele & Corell Elisabeth, 2007).

Perubahan iklim merupakan permasalahan global yang menuntut respons kolektif dari berbagai pemangku kepentingan. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, menghadapi kerentanan yang signifikan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya frekuensi bencana alam (Cooke et al., 2021).

Dalam menghadapi tantangan ini, Greenpeace telah melaksanakan berbagai program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia, termasuk upaya pelestarian hutan, perlindungan ekosistem mangrove, serta promosi energi terbarukan. Dalam perspektif Teori Organisasi Non-Pemerintah (NGO), Greenpeace memanfaatkan strategi advokasi dan kampanye untuk mendorong perubahan kebijakan lingkungan, sekaligus berkolaborasi dengan masyarakat lokal dalam mengembangkan solusi berbasis komunitas (Greenpeace Indonesia, 2020). Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah dukungan terhadap praktik pertanian berkelanjutan yang lebih resilien terhadap perubahan iklim, serta advokasi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca melalui percepatan transisi ke sumber energi bersih.

Teori Organisasi Non-Pemerintah (NGO) menawarkan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi peran Greenpeace dalam adaptasi dan

mitigasi perubahan iklim di Indonesia. (Lewis, 2014) menjelaskan bahwa NGO berfungsi sebagai aktor non-negara yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan publik, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong aksi kolektif melalui advokasi, kampanye, dan program berbasis komunitas. Sebagai organisasi lingkungan global, Greenpeace memanfaatkan jaringannya untuk memengaruhi kebijakan lingkungan di tingkat nasional dan internasional, sekaligus berupaya memberdayakan masyarakat lokal dalam penerapan solusi yang sesuai dengan konteks sosial dan ekologi (Greenpeace Indonesia, 2020).

Konsep Adaptasi dan Mitigasi

Adaptasi perubahan iklim adalah proses penyesuaian dalam sistem sosial atau ekologi sebagai respons terhadap kondisi iklim saat ini maupun yang diantisipasi, dengan tujuan memoderasi kerugian atau memanfaatkan peluang yang muncul. Dalam human systems, adaptasi mencakup “adjustment to actual or expected climate and its effects in order to moderate harm or take advantage of beneficial opportunities” (IPCC, 2023).

Barry Smit dan Johanna Wandel (2006) menekankan bahwa adaptasi terhadap perubahan iklim tidak hanya bergantung pada tindakan teknis semata, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan kapasitas adaptif suatu komunitas. Kapasitas adaptif ini merujuk pada kemampuan suatu sistem baik individu, kelompok, maupun institusi untuk merespons perubahan secara efektif. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan strategi yang berbasis partisipasi masyarakat serta integrasi isu adaptasi ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan (*mainstreaming*). Dengan kata lain, adaptasi yang berhasil menuntut proses yang inklusif dan berkelanjutan, bukan sekadar respons jangka pendek terhadap ancaman iklim (Smit & Wandel, 2006).

Adaptasi perubahan iklim merupakan rangkaian tindakan yang direncanakan untuk mengurangi kerentanan sistem sosial maupun ekosistem terhadap dampak iklim, baik yang sudah terjadi maupun yang tidak dapat dihindari di masa depan. Konsep ini diperkenalkan secara komprehensif oleh (Smit & Pilifosova, 2001), yang menekankan bahwa adaptasi mencakup berbagai bentuk penyesuaian, mulai dari aspek biologis, teknologi, infrastruktur, hingga kelembagaan. Pandangan ini kemudian diperkuat oleh laporan AR6 (IPCC, 2023) yang mendefinisikan adaptasi

sebagai “proses penyesuaian dalam sistem alami dan manusia sebagai respons terhadap rangsangan iklim aktual atau yang diperkirakan.” Dengan demikian, adaptasi menjadi elemen penting dalam upaya menghadapi tantangan perubahan iklim secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Mitigasi perubahan iklim merujuk pada berbagai upaya untuk mengurangi atau menahan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Tujuan utamanya adalah menurunkan tingkat pemanasan global dalam jangka panjang dengan cara mengurangi emisi dan/atau meningkatkan kemampuan penyerapan karbon oleh lingkungan. Menurut (Edenhofer, 2015), strategi mitigasi mencakup transisi menuju energi bersih, peningkatan efisiensi energi, perubahan dalam penggunaan lahan, serta pengembangan teknologi penangkap dan penyimpanan karbon (*carbon capture and storage* atau CCS). Sementara itu, (Rogelj et al., 2018) menegaskan bahwa pencapaian target net-zero emisi sebelum pertengahan abad ini menuntut diterapkannya strategi mitigasi yang bersifat ambisius, terintegrasi, dan segera. Kombinasi dari pendekatan-pendekatan tersebut menjadi kunci dalam upaya global untuk membatasi kenaikan suhu bumi sesuai target Perjanjian Paris.

Kedua strategi ini berfungsi secara sinergis dalam tata kelola perubahan iklim. Penerapan strategi adaptasi bertujuan untuk meningkatkan ketahanan komunitas dan ekosistem agar mampu menghadapi dampak perubahan iklim, seperti cuaca ekstrem, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan pola curah hujan. Di sisi lain, mitigasi bertujuan untuk menurunkan laju pemanasan global dan mencegah dampak iklim yang lebih parah di masa depan. Menurut (Klein et al., 2005), adaptasi dan mitigasi sebaiknya tidak dipandang sebagai dua pendekatan yang terpisah, melainkan sebagai strategi yang saling melengkapi. Ketika diterapkan secara sinergis, keduanya dapat secara signifikan mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat peristiwa iklim ekstrem, sekaligus mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Adaptasi perubahan iklim merupakan rangkaian tindakan yang direncanakan untuk mengurangi kerentanan sistem sosial maupun ekosistem terhadap dampak iklim, baik yang sudah terjadi maupun yang tidak dapat dihindari di masa depan. Konsep ini diperkenalkan secara komprehensif oleh (Smit & Pilifosova, 2001), yang menekankan bahwa adaptasi mencakup berbagai bentuk penyesuaian, mulai

dari aspek biologis, teknologi, infrastruktur, hingga kelembagaan. Pandangan ini kemudian diperkuat oleh laporan AR6 (IPCC, 2023) yang mendefinisikan adaptasi sebagai “proses penyesuaian dalam sistem alami dan manusia sebagai respons terhadap rangsangan iklim aktual atau yang diperkirakan.” Dengan demikian, adaptasi menjadi elemen penting dalam upaya menghadapi tantangan perubahan iklim secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi program adaptasi dan mitigasi sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan sektor swasta. Pemerintah daerah, misalnya, memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan tata ruang yang responsif terhadap iklim serta menyediakan insentif fiskal untuk mendorong penggunaan energi bersih (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2016). Di sisi lain, masyarakat lokal terutama di wilayah pesisir sering menjadi pelaku utama dalam kegiatan konservasi berbasis komunitas, seperti penanaman mangrove dan patroli ekosistem (Ford & Berrang-Ford, 2011).

Peran akademisi juga krusial dalam menyediakan data dan analisis berbasis ilmiah, misalnya melalui *climate vulnerability assessment* yang digunakan sebagai dasar perencanaan adaptasi (Adger et al., 2003). Sementara itu, sektor swasta berkontribusi melalui pendanaan dan penyediaan teknologi, seperti dalam kasus perusahaan telekomunikasi yang memasang panel surya di daerah terpencil untuk mendukung keberlanjutan energi (Ford & Berrang-Ford, 2011). Sinergi antarpihak ini tidak hanya memperkuat legitimasi dan keberterimaan program, tetapi juga mempercepat aliran pengetahuan, sumber daya, dan inovasi dari tingkat nasional ke lokal, dan sebaliknya.

Indonesia menghadapi dampak perubahan iklim yang signifikan, termasuk kenaikan permukaan laut, perubahan pola curah hujan, serta meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap perubahan iklim, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Oleh karena itu, penerapan strategi adaptasi dan mitigasi menjadi langkah krusial dalam mengurangi risiko serta

meningkatkan ketahanan masyarakat dan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim.

Dalam konteks ini, adaptasi dipahami sebagai proses penyesuaian yang dilakukan oleh sistem alami maupun manusia dalam merespons rangsangan iklim, baik yang sudah terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi. Tujuannya adalah untuk memoderasi potensi kerusakan serta memanfaatkan peluang yang mungkin muncul akibat perubahan iklim (IPCC, 2023). Definisi ini menegaskan bahwa adaptasi tidak semata-mata bersifat defensif, tetapi juga membuka ruang bagi transformasi positif dalam sistem sosial-ekologis yang terdampak.

Adaptasi terhadap perubahan iklim mencakup spektrum tindakan yang luas, mulai dari langkah-langkah inkremental hingga transformasional. Tindakan inkremental biasanya bersifat perbaikan bertahap pada sistem yang sudah ada, seperti peningkatan infrastruktur drainase, diversifikasi sumber mata pencaharian, atau penerapan praktik pertanian yang tahan terhadap kondisi iklim ekstrem (Smit & Wandel, 2006). Sementara itu, adaptasi transformasional melibatkan perubahan mendasar dalam sistem sosial atau ekologi, seperti relokasi permukiman di wilayah pesisir yang rawan terdampak, atau rekayasa ekosistem melalui restorasi mangrove yang secara aktif merombak struktur dan fungsi ekologis demi mengatasi batas-batas adaptasi alami (Ray Biswas & Rahman, 2023). Pendekatan ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya intensitas dan frekuensi dampak iklim yang tidak lagi dapat ditangani hanya dengan penyesuaian kecil.

Sementara itu, mitigasi merujuk pada intervensi yang dilakukan manusia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) atau meningkatkan kapasitas penyerapannya di atmosfer. Upaya ini mencakup berbagai tindakan, seperti pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, konservasi dan pengelolaan lahan secara berkelanjutan, serta penguatan fungsi ekosistem sebagai penyimpan karbon misalnya melalui restorasi hutan dan lahan basah. Mitigasi memainkan peran penting dalam menahan laju perubahan iklim dan mencegah dampak lingkungan yang lebih parah di masa mendatang (IPCC, 2014).

Penerapan strategi adaptasi dan mitigasi di Indonesia menjadi sangat krusial mengingat tingginya tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, baik dari sisi geografis maupun sosial-ekologis. Di tingkat nasional, kebijakan adaptasi

difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan regulasi, serta mobilisasi sumber daya pendanaan yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah skema *blended finance*, yang mengombinasikan anggaran negara dengan pembiayaan dari hibah internasional dan sektor swasta, guna memastikan ketersediaan dana untuk program-program adaptasi berbasis bukti dan berorientasi pada komunitas (IPCC, 2014)

Sementara itu, strategi mitigasi di Indonesia diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya domestik, dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 (Kementerian PPN/Bappenas, 2025). Target ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan, termasuk transisi menuju energi bersih, peningkatan efisiensi energi, serta perlindungan dan restorasi hutan sebagai penyerap karbon alami. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), sektor swasta, dan masyarakat lokal.

Sebagai salah satu organisasi lingkungan global terkemuka, Greenpeace berperan signifikan dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Melalui berbagai program, Greenpeace tidak hanya berkontribusi dalam advokasi kebijakan lingkungan, tetapi juga berupaya memberdayakan masyarakat lokal dalam pelestarian lingkungan serta pengurangan emisi gas rumah kaca (Greenpeace Indonesia, 2020).

Greenpeace menyoroti peran krusial perlindungan dan pemulihan ekosistem alami dalam strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Organisasi ini mendukung upaya konservasi hutan, mangrove, dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami terhadap bencana, seperti banjir dan erosi pantai (Greenpeace International, 2023). Selain itu, Greenpeace turut berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui program edukasi dan pelatihan yang mendorong penerapan praktik pertanian berkelanjutan guna meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim (Putra, 2024).

Greenpeace secara aktif mengampanyekan transisi energi global dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Di Indonesia, organisasi ini mengadvokasi pengurangan ketergantungan terhadap batu bara serta mendorong pemanfaatan

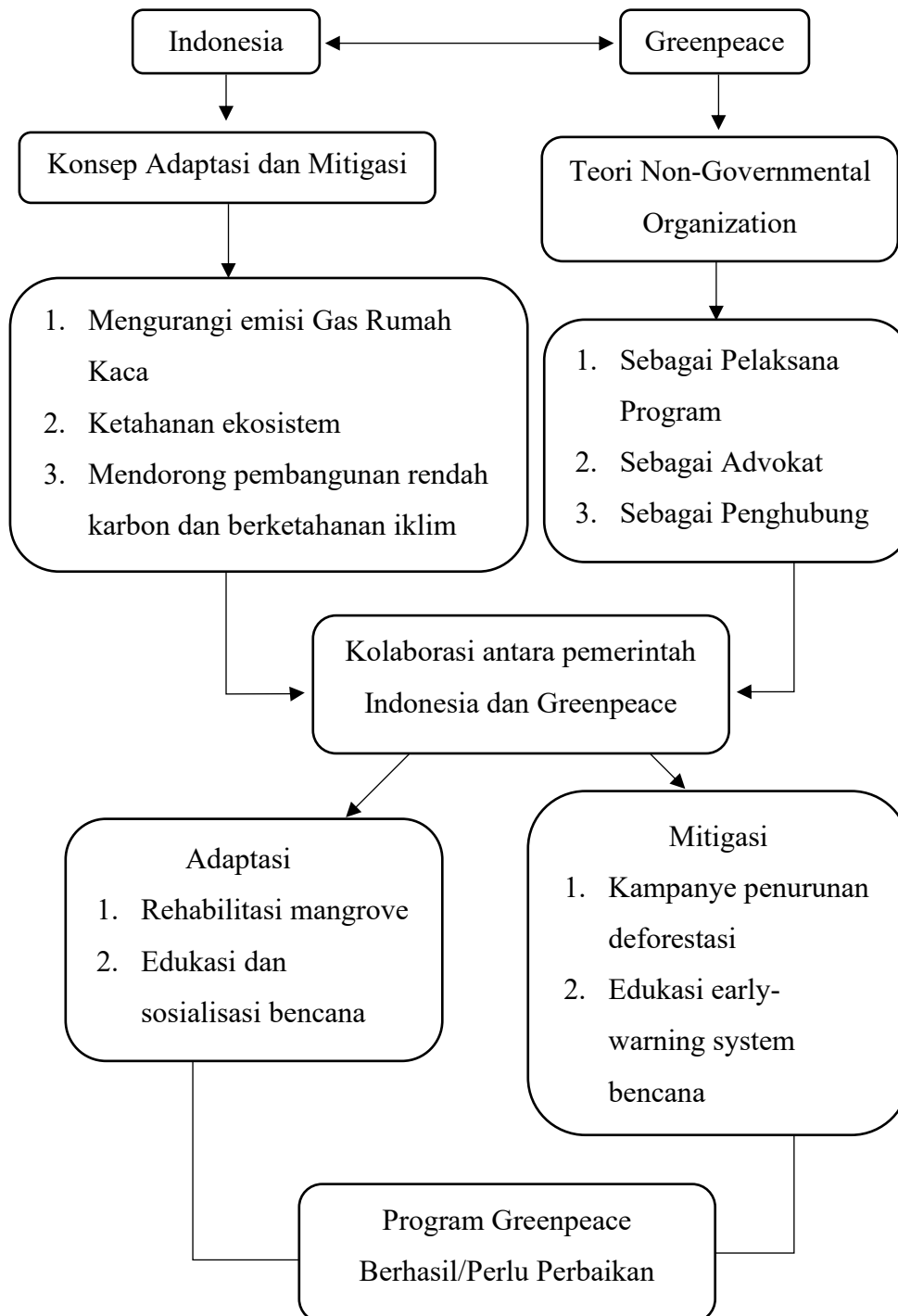
sumber energi bersih, seperti tenaga surya dan angin (Syifa & Suwatno, 2022). Selain itu, Greenpeace berperan dalam upaya penghentian deforestasi—salah satu faktor utama penyumbang emisi karbon global—melalui berbagai kampanye, termasuk *Save the Amazon* dan *Protect the Forests* (Greenpeace Brazil, 2022).

Dalam upaya menghadapi perubahan iklim, Greenpeace berperan sebagai perantara antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada advokasi kebijakan, tetapi juga berupaya memastikan bahwa isu lingkungan menjadi bagian penting dalam agenda kebijakan publik (Betsill M Michele & Corell Elisabeth, 2007). Salah satu contohnya adalah keterlibatan Greenpeace dalam kampanye untuk mendukung implementasi Perjanjian Paris 2015, yang bertujuan membatasi peningkatan suhu global di bawah 2°C (Greenpeace International, 2023).

Asumsi Penelitian

Penelitian ini berasumsi bahwa Greenpeace secara konsisten mengimplementasikan strategi advokasi, kampanye berbasis bukti (*evidence-based campaign*), dan program yang relevan untuk mendukung upaya adaptasi serta mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Selain itu, diasumsikan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan perubahan iklim melalui kerangka regulasi dan instrumen kebijakan yang terstruktur, terukur, serta sejalan dengan target penurunan emisi nasional. Lebih lanjut, diasumsikan bahwa terdapat mekanisme kolaborasi yang efektif antara Greenpeace dan pemerintah Indonesia, yang mencakup keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*), sinergi program, serta koordinasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kerangka Analisis



Kerangka analisis dalam penelitian ini dibangun di atas dua pilar teoritis utama: Teori Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dan Konsep Adaptasi–Mitigasi Perubahan Iklim. Pilar pertama menggarisbawahi bagaimana organisasi seperti Greenpeace sebagai aktor non-negara memiliki kapasitas untuk melakukan advokasi, memobilisasi sumber daya, serta membangun jejaring lintas negara guna memengaruhi kebijakan publik dan praktik di lapangan (Lewis, 2014). Sementara itu, pilar kedua menjelaskan dua strategi utama dalam tata kelola iklim, yakni *adaptasi*, yang berfokus pada penguatan ketahanan masyarakat dan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim (Smit & Wandel, 2006), dan *mitigasi*, yang bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca agar stabilitas iklim jangka panjang dapat terjaga (Edenhofer, 2015).

Berdasarkan dari dua pilar ini, kerangka analisis menempatkan dua aktor kunci pemerintah Indonesia dan Greenpeace sebagai pelaksana program (*implementation*), penggerak advokasi kebijakan (*advocacy*), sekaligus penghubung antar pemangku kepentingan (*bridge-building*). Untuk masing-masing aktor, dirumuskan tiga tujuan strategis yang menjadi tolok ukur keberhasilan sekaligus titik evaluasi: (1) mengurangi emisi gas rumah kaca, (2) meningkatkan ketahanan ekosistem, dan (3) mendorong pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Kerangka ini juga memetakan bentuk kolaborasi konkret antara Greenpeace dan pemerintah Indonesia. Dalam konteks mitigasi, kerja sama diwujudkan melalui kampanye penurunan deforestasi serta penyuluhan terkait sistem peringatan dini terhadap bencana iklim. Di sisi adaptasi, kolaborasi terlihat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove serta pelatihan masyarakat untuk menghadapi ancaman cuaca ekstrem. Setiap inisiatif dianalisis berdasarkan tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan, maupun kebutuhan perbaikan yang masih ada.

Dengan demikian, kerangka analisis ini tidak hanya menyinergikan pendekatan teoritis dan praktik lapangan, tetapi juga menyediakan landasan yang sistematis untuk menilai kontribusi aktor-aktor utama dalam agenda adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara menyeluruh.